

---

## **Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi Pada BPKAD Kabupaten Bengkalis)**

**Muhammad Ludhfi<sup>1\*</sup>, Hardi Ashari<sup>1</sup>, Ibnu Khairi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi Syariah, Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis, Indonesia  
*nuhammadludhfi028@gmail.com\**

---

### **Article History:**

Received : 13-01-2026

Accepted : 20-01-2026

**Keywords:** *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); Transparansi dan Akuntabilitas; BPKAD Kabupaten Bengkalis; Pengelolaan Keuangan Daerah*

**Abstract:** *Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Proses ini menuntut pemahaman yang memadai terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta didukung oleh regulasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, dan sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Oleh karena itu, laporan magang profesi ini bertujuan untuk mengkaji proses dan penerapan standar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis. Metode penulisan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Metode tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tahapan penyusunan serta pelaporan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Bengkalis. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Bengkalis pada umumnya telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, meskipun masih ditemukan beberapa kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaannya. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.*

---

### **PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk

pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan guna mendukung pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Standar Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin keseragaman, keandalan, dan keterbandingan informasi keuangan antarperiode maupun antardaerah. Penerapan standar ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih relevan, mudah dipahami, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Dengan adanya standar yang jelas, pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Melalui peran tersebut, BPKAD menjadi salah satu unsur utama dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam praktiknya, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah melibatkan berbagai unit kerja dan memerlukan koordinasi yang baik. Proses ini mencakup pengumpulan data keuangan, pencatatan transaksi, penyesuaian, hingga penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang memadai terhadap standar penyusunan laporan keuangan menjadi faktor penting agar setiap tahapan dapat berjalan dengan optimal dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penerapan Standar Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga menuntut dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta sistem informasi yang memadai. Aparatur pengelola keuangan dituntut memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi, prinsip akuntansi pemerintahan, serta perkembangan kebijakan keuangan daerah. Hal ini diperlukan untuk menjaga konsistensi penerapan standar dan meningkatkan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan.

Melalui kegiatan magang profesi di BPKAD Kabupaten Bengkalis, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mempelajari secara langsung praktik penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Kegiatan ini memberikan gambaran nyata mengenai penerapan standar penyusunan laporan keuangan dalam aktivitas kerja sehari-hari, sekaligus memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai pengelolaan keuangan sektor publik.

Berdasarkan uraian tersebut, laporan ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan Standar Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Bengkalis. Diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi akademik serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya standar pelaporan keuangan dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam pelaksanaannya, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang saling melengkapi. Metode-metode tersebut diterapkan untuk menjamin keakuratan data, memperdalam pemahaman terhadap proses kerja, serta mendukung analisis yang sesuai dengan tujuan penyusunan laporan magang profesi.

### **1. Observasi Langsung**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja (Millah et al., 2023). Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas dan proses kerja di BPKAD Kabupaten Bengkalis, khususnya terkait penyusunan dan pelaporan keuangan daerah.

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui komunikasi tanya jawab antara peneliti (pewawancara) dan subjek penelitian (narasumber/informan) untuk memperoleh informasi mendalam mengenai suatu isu atau topik penelitian (Fadila et al., 2025). Wawancara dilakukan dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai tugas, fungsi, serta mekanisme kerja dalam pengelolaan keuangan daerah.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan metode atau teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, rekaman, atau data lain yang relevan (Fahlevvi, 2022). Dokumentasi digunakan dengan mengumpulkan dokumen pendukung seperti laporan keuangan dan arsip administrasi sebagai bahan pendukung data penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kerangka Hukum dan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah serta pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Pareda et al., 2017). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi dasar pengaturan prinsip otonomi daerah dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, pengelolaan keuangan daerah diatur secara lebih teknis melalui Peraturan Pemerintah, seperti PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Selain itu, ketentuan teknis pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan daerah juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur secara rinci mekanisme pengelolaan keuangan daerah (Febrian, 2018).

### **Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh rangkaian kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pembukuan, pelaporan, serta pertanggungjawaban atas penerimaan, pengeluaran, aset, dan kewajiban daerah (Ja'ó et al., 2023). Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah adalah memastikan

bahwa setiap sumber daya publik dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

### **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) - Dasar Akuntansi Pemerintahan**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menetapkan prinsip, dasar pengukuran, serta format penyusunan laporan keuangan pemerintah agar laporan yang disajikan berbasis akrual dan/atau kas sesuai ketentuan, konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan. SAP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (beserta perubahannya) menjadi pedoman utama dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Oleh karena itu, pemahaman terhadap SAP sangat penting bagi peserta magang, karena standar ini menjadi acuan dalam pencatatan, pengukuran, dan pelaporan setiap transaksi keuangan pemerintah, sehingga informasi yang dihasilkan dapat disajikan secara andal dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik (Prayogo et al., 2023).

### **Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah: Transparansi, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektivitas**

Pengelolaan keuangan daerah berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance*, yaitu:

#### 1. Transparansi

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka, di mana informasi mengenai perencanaan anggaran, realisasi, dan laporan keuangan dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendorong keterbukaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.

#### 2. Akuntabilitas

Setiap pejabat dan unit kerja yang mengelola keuangan daerah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran serta kebenaran data yang disajikan dalam laporan keuangan. Akuntabilitas memastikan bahwa pengelolaan keuangan dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

#### 3. Efisiensi dan Efektivitas

Penggunaan sumber daya keuangan harus dilakukan secara hemat, tepat guna, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Anggaran tidak hanya harus digunakan secara efisien, tetapi juga mampu memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta dalam tata kelola yang diterapkan oleh BPKAD sebagai pengelola keuangan dan aset daerah (Sitorus et al., 2025).

### **Siklus Penganggaran Daerah (Perencanaan – Penganggaran – Pelaksanaan – Pelaporan – Evaluasi)**

Siklus pengelolaan keuangan daerah dimulai dari tahap perencanaan, yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Setelah APBD ditetapkan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran yang mencakup kegiatan penerimaan dan belanja daerah, yang selanjutnya dicatat melalui proses penatausahaan dan pembukuan. Tahap akhir dari siklus ini adalah penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kemudian dievaluasi dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk pengawasan eksternal (Rochmah Kusli et al., 2024). Pemahaman terhadap setiap tahapan dalam siklus ini sangat penting bagi peserta magang, karena melalui siklus tersebut dapat diamati bagaimana proses administratif, pencatatan akuntansi, serta mekanisme pengendalian internal diterapkan oleh BPKAD dalam mengelola keuangan daerah

### **Pengelolaan Aset Daerah dan Peran Pengendalian Internal**

Pengelolaan aset daerah, yang meliputi kegiatan inventarisasi, pemeliharaan, penilaian, dan penghapusan aset, merupakan bagian integral dari tugas dan fungsi BPKAD. Selain itu, BPKAD juga bertanggung jawab dalam menerapkan sistem pengendalian internal guna memastikan bahwa seluruh aset dan keuangan daerah dikelola secara tertib dan aman. Pengendalian internal mencakup berbagai kebijakan dan prosedur, seperti pemisahan tugas, pencatatan dan dokumentasi yang memadai, serta kegiatan pengawasan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan (Maulidiah, 2017).

### **Peran dan Fungsi BPKAD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**

BPKAD sebagai unit pelaksana teknis di tingkat kabupaten memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan serta melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. BPKAD bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk pengelolaan penerimaan dan pengeluaran, penatausahaan, serta penyusunan dan penyajian data serta laporan keuangan daerah (Ismi Uswatun et al., 2025). Dengan peran tersebut, BPKAD menjadi pusat operasional utama dalam proses pencatatan, pembukuan, dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Melalui fungsi ini, BPKAD memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan daerah tercatat secara tertib, akurat, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pembahasan**

Penerapan Standar Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis pada dasarnya telah dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. BPKAD melaksanakan proses pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari pengumpulan data keuangan, pencatatan transaksi, hingga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penerapan standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan bersifat transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaannya, proses penerapan standar tersebut melibatkan berbagai unit kerja dan membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi, terutama dalam

hal pencatatan berbasis akrual dan penyesuaian laporan keuangan pada akhir periode. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik serta proses verifikasi dan konsolidasi data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar laporan keuangan yang disusun menjadi lebih akurat dan terpadu.

Selain itu, dinamika regulasi dan pedoman teknis yang terus berkembang menuntut aparaturnya untuk senantiasa memperbarui pemahaman dan menyesuaikan praktik pelaporan keuangan dengan ketentuan terbaru, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini menunjukkan komitmen BPKAD dalam menjaga kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan standar yang berlaku.

Secara keseluruhan, penerapan Standar Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD Kabupaten Bengkalis telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan daerah. Melalui penguatan koordinasi internal, pemanfaatan sistem informasi keuangan, serta peningkatan kompetensi aparaturnya, BPKAD terus berupaya menyempurnakan proses pelaporan keuangan. Kegiatan magang profesi ini memberikan pemahaman yang berharga bagi mahasiswa mengenai pentingnya standar pelaporan keuangan dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Bengkalis pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan yang berlaku. Proses penyusunan laporan keuangan berjalan secara sistematis sebagai wujud upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan Magang Profesi di BPKAD Kabupaten Bengkalis juga berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam memahami praktik pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, sekaligus melatih kemampuan beradaptasi, bekerja sama, dan berkoordinasi di lingkungan kerja pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fadila, F., Safriani, Eliana, & Khaddafi, M. (2025). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara (Data Collection In Qualitative Research: Interviews). *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(7), 13446-13449.
- Fahlevvi, M. R. (2022). Analisis Sentimen Terhadap Ulasan Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Di Google Playstore Menggunakan Metode Support Vector Machine. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 4(1), 1-13. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v4i1.2701>
- Febrian, R. A. (2018). Inovasi Daerah dari Perspektif Regulasi, Konseptual, dan Empiris (Tinjauan terhadap pasal Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). *Jurnal Kajian Pemerintahan*, IV, 44-55.
- Ismi Uswatun, B., Salsabila, B. M., Pratama, F., & Fatimah, S. (2025). Implementasi Fungsi Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kantor BPKAD

- Provinsi NTB. *Jurnal Abdimas Independen*, 6(1), 64–70. <https://doi.org/10.29303/independen.v6i1.2188>
- Ja'o, M. A., Rengga, A., & Luju, E. (2023). Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Anggaran Pada Kantor Camat Waigete. *Jurnal Program Studi Manajemen*, 10(3), 50–60. <https://doi.org/10.59603/projemen.v10i3.76>
- Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di Daerah. *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik, Dan Birokrasi*, III(April), 233–242.
- Millah, A. S., Apriyani, Arobiah, D., Febriani, E. S., & Ramdhani, E. (2023). Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1(2), 140–153.
- Pareda, M., Sondakh, J. J., & Ilat, V. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 268–279. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18431>
- Prayogo, Y., Fikri, A. S., & Nandini, K. P. (2023). Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (Dinamika)*, 3(2), 44–58.
- Rendi, Marni, Neonane, T., & Lawalata, M. (2024). Peran Logika Dalam Berfikir Kritis Untuk Membangun Kemampuan Memahami Dan Menginterpretasi Informasi. *Sinar Kasih: Jurnal Pendidikan Agama Dan Filsafat*, 2(2), 82–98.
- Rochmah Kusli, U. N. F., Maryam, Y. N., Puspita, T. D., Aprilia, A., & Akbar, F. S. (2024). Analisis Pengelolaan Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Sektor Pemerintah Desa Pagerwojo. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(5), 61–72. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/2764/2546>
- Saridawati, Dinar, L., Aziza, Z. N., Widasari, A. P., & Handayani, N. T. (2025). Perkembangan Akuntansi Pemerintah Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Di Kementrian Sosial. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 193–204. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v6i1.4260>
- Sitorus, L., Uswatun H, N., & Sitompul, Suci Ananda Kamila, N. F. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 235–244. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>
- Sukendri, N., & Yuli Anggreni, N. L. E. (2022). Strategi Kreatif Dosen Memacu Partisipasi Mahasiswa Dalam Mengikuti Perkuliahan. *Padma Sari: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(01), 63–72. <https://doi.org/10.53977/ps.v2i01.690>